

**EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT SEBAGAI
KOMPENSASI KENAikan HARGA BAHAN BAKAR
MINYAK TAHUN 2013 BAGI RAKYAT MISKIN**

Siti Alliyah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 'YPPI' Rembang
Email: wildankafa@yahoo.co.id

Abstract

Impact of BBM increase to the addition of the poor 4 million people. That's the government set up a compensation as mitigation or prevention. One of the program is the immediate temporary relief society (BLSM) to give four months after the BBM increase was decided. Object of BLSM is 15,5 target million households (RTS) with compensation is Rp 150,000 per month. The allocation of funds amounting to Rp 9,7 trillion. The question is whether the government program effective?

Keywords: Effectiveness, the immediate temporary relief society, compensation of BBM

PENDAHULUAN

Rapat paripurna DPR pada 17 Juni 2013 akhirnya mengesahkan RAPBN-P 2013 terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dengan keputusan tersebut maka harga premium akan menjadi Rp 6.500 dan solar Rp 5.500 per liter. Pemerintah memperkirakan kenaikan harga BBM menyebabkan ada penambahan orang miskin sebesar 4 juta jiwa. Karena itulah pemerintah menyiapkan kompensasi sebagai mitigasi atau pencegahan. Salah satunya adalah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang diberikan selama empat bulan setelah kenaikan BBM diputuskan. BLSM ditujukan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) sebesar Rp 150.000 per bulan dengan alokasi dana sebesar Rp 9,7 triliun.

Meski pemerintah meyakini dampak terhadap rakyat kecil akan bisa diredam melalui BLSM, tak sedikit ekonom dan pengamat yang beranggapan bahwa kompensasi tersebut hanya efektif untuk sesaat. Bagaimanapun kebijakan menaikkan harga BBM membawa dampak yang cukup luas dan itu tidak bisa hanya diredam

dengan memberikan BLSM. Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, jelas, ongkos transportasi pun dipastikan naik. Pendapatan masyarakat pun akan terkuras untuk biaya transportasi tersebut. Bagi rakyat miskin, beban ongkos transportasi semakin berat dan ini bisa membuat mereka tambah miskin. Apalagi komponen biaya transportasi rakyat di Indonesia terbilang cukup tinggi. Berdasarkan standar Bank Dunia, biaya transportasi dibanding pendapatan masyarakat mestinya hanya mencapai 10%. Namun, masyarakat Indonesia sudah menghabiskan sekitar 25-30% dari pendapatan sebulannya.

Hasil penelitian SMERU (2011) menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2008 sudah lebih baik daripada program BLT tahun 2005, terutama pada proses sosialisasi, pembagian kartu, dan pencairan dana. Kelemahan tersebut umumnya terkait dengan aspek kelembagaan, penetapan sasaran, dan penanganan masalah/pengaduan. Berdasarkan persepsi masyarakat, khususnya penerima BLT tahun 2005, BLT dinilai mampu membantu meskipun terbatas untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam jangka pendek. Selain itu juga

ditemukan adanya pemotongan wilayah di beberapa wilayah. Walaupun terjadi ketidaktepatan sasaran dalam jumlah terbatas, BLT bukan merupakan disinsentif bagi partisipasi tenaga kerja.

Iqbal (2008) yang meneliti implementasi program BLT tahun 2008 di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa pelaksanaan program berupa sosialisasi program, verifikasi data, pembagian kartu, pencairan dana, dan pembuatan laporan berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan aman. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program adalah sikap pelaksana program yang kurang baik, kondisi sosial ekonomi yang hampir sama menimbulkan kecemburuan, situasi politik yang mendukung dan menolak program, keterampilan pelaksana program yang masih perlu ditingkatkan, dan koordinasi antara pelaksana program yang masih perlu dilegalkan.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian tersebut di atas, ternyata bantuan langsung sementara kepada masyarakat sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM mengakibatkan bertambahnya penduduk miskin dan implementasinya pun belum efektif. Yang artinya pembagian BLT/BLSM masih bermasalah, terutama ketidaktepatan bantuan kepada rumah tangga sasaran (penduduk miskin) dan masih belum terorganisirnya kelembagaan yang ditunjuk membagikan BLT/BLSM.

KEMISKINAN

Secara teori sosial-ekonomi, masalah kemiskinan tidak terjadi begitu saja, melainkan ada sebab juga akibatnya. Kemiskinan dapat merupakan kemiskinan absolut ataupun kemiskinan relatif. Kemiskinan dapat pula diartikan secara sempit maupun secara luas. Namun intinya kemiskinan merupakan kondisi yang tidak memuaskan ataupun kondisi yang tidak diinginkan yang memiliki indikator-

indikator penyebab ketidak berdayaan. Menurut *Word Bank* dalam Mubyarto (2003) berbagai aspek yang menunjukkan kemiskinan adalah kemiskinan tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut dalam menghadapi masa depan, kehilangan anak akibat sakit karena serana kesehatan buruk. Kemiskinan adalah ketidak berdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan (BPS, 2012).

Dalam ranah keluarga menurut BKKBN sebagaimana dikutip oleh Sugiono (2003) kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera jika tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan dua kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja dan berpergian, rumah berlantai tanah

dan tidak mampu membawa keluarganya ke sarana kesehatan. Pengertian BKKBN diartikan lebih lanjut menjadi keluarga miskin. Keluarga miskin menurut BKKBN adalah paling kurang satu kali seminggu keluarga makan daging/telur/ikan, satu tahun sekali anggota keluarga memperoleh pakaian baru, luas lantai rumah paling kurang 8 meter² untuk tiap penghuni. Sedangkan keluarga miskin menurut *World Bank* adalah kepala keluarga tidak dapat mencapai penghasilan US \$ 1 per hari.

Kemiskinan dapat dibagi menjadi beberapa golongan: 1) Kemiskinan absolut adalah jika hasil pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan); 2) Kemiskinan relatif adalah seseorang yang hidup di atas garis kemiskinan, namun orang tersebut masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitar; 3) Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya; dan 4) Kemiskinan struktural terjadi karena adanya struktur kebijakan pemerintah yang timpang sebagai akibat dari telah terjadinya ketidakadilan pada kehidupan masyarakat dalam waktu yang cukup lama.

Selain itu kemiskinan dapat dilihat dari berbagai dimensi. Kemiskinan yang disebabkan berkaitan dengan pembangunan dapat dibedakan menjadi kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat dari rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan sebagai akibat dari peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat

dan percepatan pertumbuhan perkotaan), kemiskinan sosial (kemiskinan yang dialami oleh para perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas, serta kemiskinan konsekuensial,

yaitu kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya laju jumlah penduduk melebihi laju jumlah pendapatan nasional. Apabila ditelusuri lebih lanjut dari sebab dan akibatnya maka, dapat disimpulkan bahwa mereka miskin memang karena ia miskin. Logika berpikir secara makro ini sebenarnya telah lama dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, seorang ahli ekonomi pembangunan di tahun 1953, yakni; bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*) (Prasetyo dan Maisaroh, 2009).

Penyebab lain kemiskinan adalah bermuara pada lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Sharp *et. al.* (1996) mengidentifikasi tiga penyebab utama kemiskinan yang dipandang dari sisi ekonomi, yaitu: 1) Secara mikro, kemiskinan terjadi karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah; 2) Kemiskinan terjadi sebagai akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM yang rendah berarti produktivitas rendah, dan pada gilirannya upah atau pendapatannya rendah. Rendahnya kualitas SDM ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau keturunan; dan 3) Kemiskinan terjadi sebagai akibat perbedaan akses dalam kepemilikan modal.

Strategi yang bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan adalah: 1) Pemberdayaan, yaitu peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur dan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial untuk memberikan kepercayaan dan peluang kepada masyarakat; 2) Kemitraan, yaitu kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan,

kolaborasi, dan pelaksanaan jaringan kerja yang menumbuhkan kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra dan mengoptimalkan pelayanan-pelayanan yang bersifat terpadu; dan 3) Partisipasi, yaitu prakarsa, peranan, dan keterlibatan semua pihak pelaku pembangunan dan penerima pelayanan, lingkungan sosial dan penyedia pelayanan dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosial (Hikmat dalam Riyani dan Suherma, 2010).

Dalam teori ekonomi Gunnar Myrdal, ditegaskan argumentasinya bahwa sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan di negara yang belum maju harus dilakukan dengan campur tangan pemerintah terutama dalam mempengaruhi kekuatan pasar bebas. Kemudian tentang teori keunggulan komparatif yang digunakan oleh ahli ekonomi neoklasik tidak dapat dijadikan petunjuk untuk proses alokasi sumber-sumber ekonomi. Harus ada perlindungan (pemberdayaan) atas industri-industri rakyat yang belum berkembang dari persaingan dengan luar negeri. Tujuannya adalah bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk mengurangi beban si miskin.

Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan daerah beragam. Misalnya untuk kasus propinsi Jawa tengah dan Jawa Timur masing-masing dianalisis 14 variabel yang meliputi kepadatan penduduk, tingkat pengangguran, realisasi ipeda, luas tanah pertanian, tanah rusak, luas panen bahan makanan, jumlah pemilik tanah, nilai ternak, panjang dan lebar jalan kendaraan roda empat, rumah permanen dan semi permanen dan jumlah anak per kepala keluarga, tanah pertanian rakyat, jumlah anak per penduduk (Direktorat Tata Guna Tanah Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri sebagai mana dikutip Rusli *et al.*, 2002).

Daerah miskin diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Miskin sekali, daerah-daerah yang pendapatan perkapita penduduknya dibawah 75 persen dari kebutuhan hidup minimum; 2) Miskin adalah daerah-daerah yang pendapatan perkapita penduduknya 25 persen kurang, tepat di garis kemiskinan atau 25 persen lebih dari pada kebutuhan hidup minimum; 3) Hampir miskin adalah daerah-daerah yang pendapatan perkapita penduduknya 25 persen lebih dari pada kebutuhan hidup minimum sampai mencapai kebutuhan hidup sekunder (200 persen); dan 4) Tidak miskin adalah daerah-daerah yang pendapatan perkapita penduduknya melebihi kebutuhan hidup sekunder.

Faktor utama kemiskinan di Indonesia menurut BPS (2004) dalam Sahdan (2005) adalah; 1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; 2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; 3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; 4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; 5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; 6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; 7) terbatasnya akses terhadap air bersih; 8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; 9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; 10) lemahnya jaminan rasa aman; 11) lemahnya partisipasi; 12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; dan 13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM)

Program BLSM adalah salah satu program kompensasi kenaikan harga BBM.

Program ini dimaksudkan pemerintah untuk membantu warga miskin sesudah adanya kenaikan harga BBM yang berakibat terhadap kenaikan biaya hidup. Penduduk yang tergolong keluarga miskin (gakin) dianggap layak mendapat uang tunai Rp 150.000 per keluarga per bulan selama empat bulan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS). Total anggaran program kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp 29,4 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp 7,5 triliun, tambahan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp

0,7 triliun, alokasi tambahan untuk program raskin Rp 4,3 triliun, alokasi untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp 9,7 triliun serta alokasi Program Infrastruktur Dasar sebesar Rp 7,25 triliun. Pembagian kartu BLSM sudah dimulai setelah kenaikan harga BBM tanggal 22 Juni 2013.

Syarat mendapatkan dana bantuan langsung tunai rumah tangga harus memenuhi 14 kriteria rumah tangga miskin BPS 2005 dan rumah tangga tersebut memenuhi minimal 8 kriteria. Adapun kriteria rumah tangga miskin tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Kriteria Penduduk Miskin

No	Variabel kemiskinan	Karakteristik Kemiskinan
1	Luas lantai bangunan tempat tinggal	Kurang dari 8 m ² per orang
2	Jenis lantai bangunan tempat tinggal	Tanah/bambu/kayu murahan
3	Jenis dinding bangunan tempat tinggal	Bambu/rumbai/kayu kualitas rendah/tembok tanpa plester
4	Fasilitas tempat buang air besar	Tidak ada, menumpang rumah lain
5	Sumber penerangan rumah tangga	Bukan listrik
6	Sumber air minum	Sumur, mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan
7	Bahan bakar untuk memasak	Kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8	Konsumsi daging/ayam/susu/per minggu	Satu kali atau dua kali seminggu
9	Pembelian pakaian baru setiap anggota rumah tangga setiap tahun	Tidak pernah membeli/satu stel
10	Frekuensi makan dalam sehari	Satu kali/ dua kali sehari
11	Kemampuan membayar untuk berobat ke puskesmas atau dokter	Tidak mampu membayar
12	Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga	Petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 Ha/buruh tani/ nelayan/ butuh bangunan/ pekerjaan lainnya dengan pendapatan rumah tangga dibawah Rp. 600.000,00 per bulan
13	Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga	Tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya tamatan SD
14	Pemilikan aset/harta bergerak maupun tidak bergerak	Tidak punya tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,00 seperti sepeda motor (kredit maupun bukan kredit), emas, perhiasan, perahu motor dan barang modal lainnya

Sumber: BPS, 2005

SIMPULAN

1. Program BLSM dimaksudkan pemerintah untuk membantu warga miskin sesudah
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan

adanya kenaikan harga BBM yang berakibat terhadap kenaikan biaya hidup.

program adalah sikap pelaksana program yang kurang baik, kondisi sosial ekonomi yang hampir sama menimbulkan kecemburuan, situasi politik yang mendukung dan menolak program, keterampilan pelaksana program yang masih perlu ditingkatkan, dan koordinasi antara pelaksana program yang masih perlu dilegalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2005, "*Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan Komite Penanggulangan Kemiskinan*", Jakarta.
- BPS dan Bappeda Rembang, 2012, "*Rembang Dalam Angka*", Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Dharmawan, Leonard, 2008, "*Analisis Pengaruh Program Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Di Pedesaan Melalui Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dan Raksa Desa (Kasus Desa Cibatok Satu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat)*", Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Skripsi tidak dipublikasikan.
- Faisal, Sanapiah, 1990, "*Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*", YA3, Malang.
- Moleong, Lexy J., 2002, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mubyarto. 2003. "Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Th. II - No. 2 - April 2003.
- Riyani, Yani dan Linda Suherma, 2010, "Analisis Pengaruh Program Pengentasan Kemiskinan Dalam Upaya Menghasilkan Suatu Model Pengentasan kemiskinan yang Berkelanjutan (Studi Eksperimen pada Dusun Wonodadi Desa Sei Bulan Kabupaten Kubu raya, Provinsi Kalimantan Barat), *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Volume 8, nomor 2, hlm. 318 – 324.
- Prasetyo, P. Eko dan Siti Maisaroh, 2009, "Model Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Trikonomika*, Volume 8 no. 2, hlm. 103-125.
- Sahdan, G., 2005, "Penanggulangan Kemiskinan Desa", *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Maret, Th II no. 16.
- Sharp, Ansal M., et.al. 1996. *Economics of Social Issues* (12rdediton). Chicago: Richard D. Irwin.
- SMERU, 2011, "*Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia*", Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- www.bps.go.id. "Kemiskinan", diakses hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2013 pukul 04.00.

PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN LQ 45

Sri Layla Wahyu Istanti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 'YPPI' Rembang
Email: algis_2477@yahoo.co.id

Abstract

This study examines the effect of dividend policy on stock prices on companies LQ 45 in 2004-2008. Selection of LQ 45 firms as stocks of companies included LQ 45 is a liquid stock and include top ranking of a number of outstanding shares in the Indonesian Stock Exchange. This study uses a simple regression analysis techniques. The results showed that the positive effect of dividend policy on stock prices, but the effect is very small. The conclusion of this study is the dividend policy is not the only factor affecting stock prices, but there are other factors that influence, namely macro and micro economic factors.

Keywords: dividend policy, stock price

PENDAHULUAN

Sekarang ini persaingan dunia bisnis semakin ketat, untuk menghadapi persaingan usaha dibutuhkan jumlah modal yang tidak sedikit, baik modal yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan, termasuk investor dengan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen. Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Besarnya dividen yang diterima pemegang saham ditentukan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) perusahaan. Kebijakan dividen yang diterapkan pada perusahaan akan berpengaruh pada arus pendanaan, kesempatan investasi struktur financial, arus pendanaan serta posisi likuiditas perusahaan. Nurmala (2006) menyebutkan bahwa seorang manajer sangat berperan dalam menentukan kebijakan dividen, sehingga akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang baik dimata investor. Adanya kebijakan dividen yang mengakibatkan kenaikan dividen dari tahun ke tahun membuat tingkat kepercayaan investor semakin meningkat, sehingga secara

tidak langsung memberikan informasi bahwa manajer dapat mengelola perusahaan dengan adanya peningkatan jumlah dividen bagi para investor. Informasi tersebut juga berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran saham, sehingga dapat menaikkan harga saham, karena adanya peningkatan nilai perusahaan.

Saham perusahaan yang termasuk dalam LQ 45 mendiskripsikan bahwa saham perusahaan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bursa Efek. Kelompok saham yang termasuk dalam LQ 45 telah memenuhi kriteria ranking tinggi pada total transaksi, nilai saham transaksi serta frekuensi transaksi saham. Penelitian ini menggunakan tahun 2003-2007 karena pada awal 2003, indek harga saham LQ 45 pada posisi 3 87,8 dan 30 April 2004 pada posisi 170,6, sehingga terjadi kenaikan atau return saham pada waktu tersebut sebesar 72,8 point atau 82,9% (suaramerdeka.com). Pada tahun 2006 lembaga penjamin simpanan menurunkan suku bunga maksimum penjaminan Bank Umum sebesar 50 basis point menjadi 10,75% untuk periode 15

Oktober – 14 Nopember 2006 (Kompas, 11 Oktober 2006). Dari latar belakang permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham pada perusahaan LQ 45.

DIVIDEN

Menurut Baridwan (2004) yang dimaksud dengan dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Biasanya dividen dibagikan secara periodik, namun tidak menutup kemungkinan pembagian deviden dilakukan pada waktu tertentu diluar kebiasaan. Apabila dividen yang dibagikan tidak dalam bentuk uang, maka akan dicatat dalam judul yang sesuai.

1. Pengertian Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan cara pembagian dividen kepada para pemegang saham yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Kebijakan deviden ini akan mempengaruhi para investor dan persepsinya dipasar modal. Kebijakan dividen yang dipakai setiap perusahaan berbeda-beda tergantung budaya, kondisi ekonomi, faktor lainnya. Menurut Kamaruddin (2004 : 191) Kebijakan dividen diartikan secara umum sebagai pembayaran laba perusahaan kepada pemegang sahamnya. Kebijakan dividen adalah keputusan keuangan, yaitu dengan mempertimbangkan apakah pembayaran dividen akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham.

2. Investasi Saham

Menurut buku panduan pemodal (2008 : 27) saham merupakan bukti penyertaan modal disuatu perusahaan, atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Bentuk saham adalah selebar kertas berkekuatan hokum yang

menjelaskan bahwa pemilik kertas tersebut ikut andil dalam penyertaan modal perusahaan. Sedangkan menurut Sutrisno (2001) saham merupakan surat bukti kepemilikan perusahaan atau penyertaan pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT).

Menurut buku panduan pemodal (2008) keuntungan berinvestasi saham adalah adanya Capital Gain yang merupakan keuntungan dari hasil jual beli saham berupa kelebihan nilai jual dari nilai saham dan dividen yang merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang sahan. Besarnya tidak seluruh keuntungan perusahaan dibagikan kepada pemegang saham, tapi ada bagian yang ditanam kembali.

Menurut Sunariyah (2006 : 49) risiko berinvestasi saham adalah tidak mendapat dividen perusahaan atau membagikan dividen jika operasi perusahaan menghasilkan keuntungan. Kondisi Capital Loss merupakan hal yang berlawanan dari Capitall gain, yang merupakan kondisi dimana harga jual saham lebih rendah dari harga beli saham. Sehingga jika perusahaan tersebut mengalami capital loss dia akan terancam bangkrut dan bisa dibubarkan. Adanya kondisi tersebut, mengakibatkan hak klaim dari pemegang saham saat pelunasan hasil penjualan kekayaan perusahaan mendapat prioritas terakhir. Risiko lain yang dihadapi oleh para pemodal adalah saham perusahaan dikeluarkan dari pencatatan Bursa Efek alias diDelist. Saham perusahaan yang di delist dari Bursa pada umumnya mempunyai kinerja yang buruk, misalkan dalam beberapa periode tidak pernah memperdagangkan sahamnya, terjadi penrunan harga saham sehingga mengalami kerugian terus menerus,

dividen yang tidak dibagikan serta kondisi lain sesuai aturan bursa yang membuat saham tersebut didelist.

Jenis-jenis saham

- a. Saham biasa (Common Stock), yaitu setiap pemegang saham memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan pada perusahaan. Nilai sertifikat saham menurut Sunariyah (2006 : 127-128) meliputi nilai nominal (Par Value) adalah harga saham pertama yang tercantum pada sertifikat badan usaha, nilai Buku (Book Value), nilai saham akan berubah karena ada laba tahan. Nilai buku untuk setiap lembar saham dihitung dari pembagian jumlah nilai buku dengan jumlah lembar saham. Nilai dasar (Base Price), berkaitan dengan harga pasar saham yang bersangkutan setelah dilakukan penyesuaian karena corporate action. Nilai pasar (Market Price), adalah harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung di bursa efek.
- b. Saham Preferensi (Preferred stock) menurut Sunariyah (2006) meliputi Pemegang saham preferen mempunyai hak keistimewaan diatas pemegang saham biasa, untuk hal-hal tertentu yang diperjanjikan saat emisi saham. Keistimewaan ini bervariasi antara satu emiten dengan yang lain, berdasarkan kesempatan antara permodal dengan emiten. Pemegang saham preferen mendapatkan dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Masing-masing pemegang saham preferen mempunyai jumlah dividen yang telah ditentukan dan disepakati oleh pihak manajemen dan pemegang saham. Perlakuan pemilik saham preferen adalah sebagai berikut:
 - Pada saat pembagian dividen, pemegang saham preferen mempunyai

hak untuk dibayarkan terlebih dahulu daripada pemegang saham biasa.

- Pada saat terjadi likuidasi, hak klaim pemegang saham preferen lebih didahulukan daripada pemegang saham biasa.
 - Pemegang saham preferensi tidak mempunyai hak suara (voting)
3. Indeks LQ 45

Indeks ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas saham-saham tersebut mempertimbangkan kapasitas pasar. Indeks LQ 45 pertama kali diluncurkan pada tanggal 24 Pebruari 1997. Untuk seleksi awal digunakan data pasar dari Juli 1993 – Juni 1994, hingga terpilihnya AS emited 72% dari total kapitalisasi pasar dan 72,5 dari total nilai transaksi di pasar regular. (Sunariyah, 2008 : 142 – 143). Pertimbangan yang mendasari pemilihan saham yang masuk dalam indeks LQ 45 menurut Jogiyanto (2008) yaitu:

- a Selama 12 bulan terakhir, rata-rata transaksi sahamnya masuk dalam urutan 60 terbesar di pasar regular.
- b Selama 12 bulan terakhir, rata-rata nilai kapitalisasi pasarnya masuk dalam urutan 60 terbesar di pasar regular.
- c Telah tercatat di Bursa Efek Indonesia paling tidak selama tiga bulan.

Berdasarkan kajian teoritik dapat disimpulkan bahwa dalam berinvestasi saham, investor akan memperoleh keuntungan dan kerugian. Keuntungan tersebut diantaranya adalah dividen. Untuk membagikan dividen bagi para pemegang saham, perusahaan perlu menerapkan kebijakan dividen. Besarnya dividen yang diperoleh pemegang saham tergantung dari jenis kebijakan yang digunakan perusahaan.

Kebijakan dividen yang digunakan diputuskan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) perusahaan.

Dari Teori diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga saham LQ 45 di BEI.

METODE PENELITIAN

1. Definisi Operasional

Variabel dependen dari penelitian ini adalah Harga Saham yang merupakan bukti kepemilikan suatu PT atau perusahaan yang diukur dalam satuan moneter atau unit barang. Variabel independen penelitian ini adalah Kebijakan dividen yang merupakan cara pembagian dividen kepada para pemegang saham yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Proksi yang digunakan untuk mengukur dividen adalah Dividen Payout Ratio merupakan pembayaran dividen kepada para pemegang saham dari laba bersih perusahaan dengan rumus:

$$\text{Payout Ratio} = (\text{dividen: EPS}) \times 100\%$$

EPS = Earning Per Share (laba per lembar saham)

2. Sasaran Penelitian

Sasaran Penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen dari saham LQ 45 yang terdaftar di BEI. Pemilihan objek penelitian ini dikarenakan saham LQ 45 merupakan saham yang terfavorit sejumlah 45 saham. Saham yang berhak masuk dalam kelompok tersebut adalah yang memenuhi kriteria rangking tinggi pada total transaksi, nilai transaksi dan frekuensi transaksi.

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini purposive Sampling, kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Perusahaan yang tergabung dalam kelompok LQ 45 yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2004-2008.

- b. Membagikan dividen secara konsisten dan terus-menerus selama periode tahun 2004-2008.
- c. Kelengkapan data harga saham dan dividen per lembar saham yang dibagikan selama periode tahun 2004-2008.

Berdasarkan kriteria di atas maka sampel perusahaan yang digunakan sebanyak 11 perusahaan

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, di mana data tersebut telah diolah oleh perusahaan, sedangkan sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara dekumentasi, yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia guna memperoleh informasi mengenai daftar nama perusahaan yang tergabung LQ 45 yang terdaftar di BEI, kebijakan dividen, harga saham pada saat pembukaan dan penutupan, dividen payout ratio. Data dividen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2004–2008.

- b. Teknik Analisis data

Untuk uji kualitas data pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi sederhana karena hanya terdapat satu variabel dependen dan satu variabel independen, dimana:

$$Y : a + bx + e$$

Keterangan :

- a. : Konstanta
- b : Koefisien regresi
- y : Harga saham

x : Kebijakan dividen
e : Standart error

PEMBAHASAN

1. Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik penelitian ini menunjukkan bahwa data yang diolah telah lolos uji asumsi klasik. Pada data tersebut terbebas dari autokorelasi, multikolinearitas, heterokedastisitas dan terdistribusi normal.

2. Analisis Regresi

Pada dasarnya analisis regresi sederhana pada penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini model regresi yang digunakan adalah model regresi sederhana dengan variabel terikat harga saham dan variabel bebas adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen yang digunakan adalah Dividen Payout Ratio. Berikut peneliti sajikan hasil pengolahan dengan analisis regresi sederhana.

Tabel 1.
Model Summary (b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,236(a)	,056	,038	10842,62	2,133

a Predictors: (Constant), payout

b Dependent Variable: DTAC

Dari uji pengaruh secara partial dengan SPSS diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,766 > 1,671$) pada taraf signifikansi sebesar 0,10 atau $\alpha = 10\%$. Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh kebijakan dividen payout ratio terhadap harga saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uji determinasi dapat diketahui bahwa sebesar 3,8% variabel kebijakan dividen payout ratio mempengaruhi harga saham LQ45. Sedangkan sisanya 96,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

3. Pengujian Hipotesis

Dari hasil pengolahan diatas, dihasilkan t hitung untuk variabel kebijakan dividen (payout ratio) sebesar 1,766. Sehingga besarnya t hitung lebih besar dari t tabel ($1,766 > 1,671$). Hal ini berarti H_0 ditolak atau H_a diterima.

Sekaligus menjadi bukti bahwa hipotesis dalam penelitian ini terbukti. Artinya ada pengaruh yang positif antara kebijakan dividen (payout ratio) terhadap harga saham LQ45.

4. Analisis Kualitatif

Kebijakan dividen merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi investor untuk berinvestasi. Dalam kondisi perekonomian normal, tindakan manajemen yang menyebabkan pendapatan dividen meningkat akan meningkatkan nilai saham. Sebaliknya tindakan manajemen yang dapat meningkatkan risiko dan menurunkan nilai saham. Dari pengujian yang telah dilakukan kebijakan dividen (payout ratio) memang mempunyai hubungan dengan harga saham LQ45, serta berpengaruh positif terhadap harga

saham LQ45, meskipun persentasenya kecil. Adanya pengaruh yang kecil ini disebabkan karena kebijakan dividen bukan merupakan faktor satu-satunya yang dapat mempengaruhi harga saham di bursa efek.

Faktor lain yang mempengaruhi harga saham antara lain kondisi makro ekonomi yang berupa pertumbuhan ekonomi global, regulasi pemerintah, kebijakan pajak, tingkat keamanan, kondisi sosial politik, tingkat bunga serta kerjasama ekonomi dengan luar negeri. Selain kondisi makro, kondisi mikro ekonomi juga mempengaruhi harga saham, yang meliputi agio saham, over suplai sekuritas serta peristiwa di pasar modal.

Dari uji hubungan antara variabel X (kebijakan dividen payout ratio) dengan variabel Y (harga saham LQ45) yang dihitung dengan koefisien korelasi Rank Spearman adalah 0,045. Hal ini menunjukkan arah hubungan yang positif ini menunjukkan bahwa semakin besar kebijakan dividen payout ratio akan membuat harga saham LQ45 semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.

Dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Nurmala pada tahun 2006, disimpulkan bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham pada perusahaan otomotif yang telah go publik di Bursa Efek Jakarta. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Lani Siyaputra dan Adwin Surja Admaja tahun 2006, terungkap bahwa adanya pengaruh perbedaan harga saham yang signifikan secara statistik yang disebabkan oleh pengumuman dividen pada 70,8% sampel penelitian.

Jadi, dengan adanya kebijakan dividen dapat meningkatkan harga saham. Walaupun persentasenya hanya kecil, karena masih banyak faktor-faktor

lain yang mempengaruhi harga saham. Faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya, yaitu kondisi makro dan mikro ekonomi. Kondisi makro tersebut antarlain : pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kebijakan fiskal, kondisi sosial politik, tingkat bunga serta sosial politik luar negeri. Kondisi mikro tersebut antarlain : agio saham, adanya over suplai sekuritas serta peristiwa-peristiwa di pasar modal. Menurut pembahasan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga saham.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara Kebijakan dividen dengan harga saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia.
2. Terdapat pengaruh Kebijakan dividen terhadap harga saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Pihak perusahaan harus mempunyai rencana investasi yang menguntungkan untuk dilaksanakan di tahun berikutnya.
2. Para pemegang saham harus melihat bahwa kebijakan dividen bukanlah informasi yang relevan, karena masih banyak faktor yang lain yang mempengaruhi harga saham.
3. Pada penelitian berikutnya diharapkan menambah jumlah variabel independen serta menambah periode penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik daripada penelitian sebelumnya, karena kebijakan dividen bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan harga saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamaruddin, 2004, *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2003, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Baridwan, Zaki, 2004, *Intermediate Accounting*, BPFE, Yogyakarta.
- Cooper, Donald R dan Pamela S Schindler, 2006, *Metode Riset Bisnis*, PT. Media Global Edukasi, Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan B Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis*, BPFE, Yogyakarta. Jogiyanto, 2008, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, BPFE, Yogyakarta.
- Jusuf, Al. Haryono, 1999, *Dasar-dasar Akuntansi jilid II*, Bagian penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.
- Nurmala, 2006, *Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham Perusahaan–Perusahaan Otomotif di Bursa Efek Jakarta*, Jurnal Mandiri, Vol 9 No. 1 Juli – September, hal 17-24.
- Siaputra, Lani, dan Adwin Surja Admadja, 2006, *Pengaruh Pengumuman Dividen terhadap perubahan harga saham sebelum dan sesudah Ex-Dividen date di Bursa Efek Jakarta*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 8, No. 1, Mei 2006, hal 71-77.
- Sunariyah, 2006, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sutrisno, 2001, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Penerbitan Ekonisia, Yogyakarta.
- Umar, Husein, 2007, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.